

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pembangunan selalu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), dimana manusia diposisikan sebagai sasaran pembangunan dan sebagai pelaksana dari pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, manusia merupakan faktor yang berperan penting, karena tanpa adanya sumber daya manusia, pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, potensial dan produktif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai semaksimal mungkin. Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu dari tujuan nasional UNDP (*United Nations Development Programme*) menetapkan kemajuan suatu negara dapat ditentukan oleh tiga indikator indeks pembangunan manusia, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks perekonomian.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam pembangunan ekonomi jangka panjang bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi yang terpasang dalam masyarakat yang bersangkutan. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat sentral, khususnya dibidang pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dimana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam ekonomi masyarakat.

Pembangunan sumber daya manusia diupayakan melalui investasi *human capital* (modal manusia) yaitu pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman (Mankiw, 2003: 542). Dimana manusia dididik untuk dapat mengenal lingkungannya sehingga berkembang menjadi manusia yang berkepribadian. Kegiatan pembangunan ekonomi dipandang sebagai seluruh usaha pembangunan yang dijalankan oleh masyarakat. Pembangunan ekonomi meliputi usaha suatu masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan. Usaha masyarakat bersama-sama dengan pemerintah untuk mengembangkan aktivitas ekonomi guna meningkatkan pendapatan menurut Sumardi dan Ever (dalam Fuad, 2000: 7).

Pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, manusia dituntut untuk berusaha secara maksimal guna memenuhi kebutuhannya yang merupakan syarat kelangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus beraktivitas yang disebut bekerja. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan juga keluarga. Menurut Suparmoko (1991) Pendapatan nasional merupakan pengukur bagi tinggi rendahnya tingkat hidup atau kemakmuran suatu masyarakat yang secara kuantitatif tingkat hidup masyarakat ditentukan oleh pendapatan perkapita. Jadi meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan rill perkapita.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan pembangunan di suatu negara. Pendidikan yang baik akan menghasilkan pembangunan dan sumber daya manusia yang baik juga. Pada UNDP (*United Nations Development Programme*), bahwa angka melek huruf sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan.

Perubahan sosial dan perkembangan teknologi mengharuskan dunia pendidikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kebutuhan pengetahuan dan penguasaan ketrampilan sebagai syarat kecakapan hidupnya. Disisi lain penyelenggaraan pendidikan masih mengalami hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti mahal biaya pendidikan, kualitas sumber daya pendidiknya, dan banyaknya warga belajar yang karena beberapa alasan tidak dapat menikmati kesempatan menyelesaikan pendidikannya khususnya di jalur formal. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa, “pendidikan di Indonesia diselenggarakan dalam tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal”. Pendidikan nonformal merupakan alternatif bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan belajarnya di jalur formal, mereka oleh pemerintah diberikan kesempatan untuk dapat memperoleh pendidikan melalui jalur nonformal.

Sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 dinyatakan bahwa

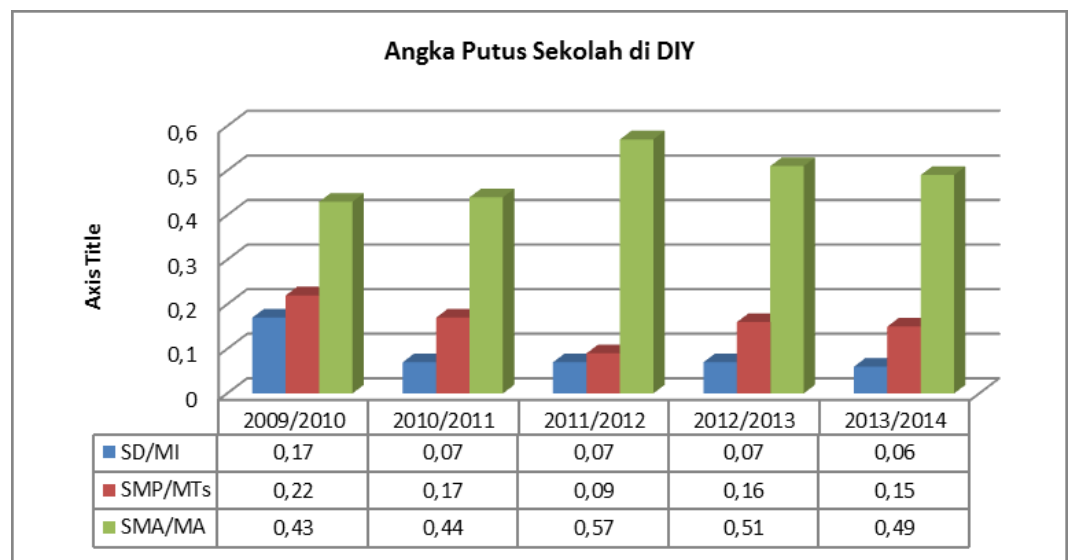
“Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan

ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”.

Pendidikan non formal sebagai bentuk program penguatan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan pembelajaran dan penilaian, penyediaan dan peningkatan keterjangkauan pembiayaan yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin terlayani pendidikannya di jalur pendidikan formal, yang dikarenakan beberapa alasan yaitu, dari segi ekonomi atau pendapatan orang tua, dari segi usia yang sudah di atas usia anak sekolah, masyarakat yang putus sekolah dan belum menempuh pendidikan sampai sembilan tahun. Program yang diselenggarakan dalam Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi Program PAUD, Program Pendidikan Kesetaraan, Program Pemberantasan Buta Huruf, Program Taman Bacaan Masyarakat, Program Pendidikan Perempuan, Program Pendidikan Berkelanjutan, Program Pemberdayaan, Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola program PNF dari, oleh dan untuk masyarakat.

Faktor penyebab belum tuntasnya pendidikan dasar sembilan tahun menurut Ace Suryadi (2006) karena tinggal di daerah terpencil atau terisolasi sehingga tidak dapat menjangkau sekolah, tidak bersekolah

karena alasan ekonomi, bekerja mencari nafkah untuk membantu orang tua, tinggal di masyarakat yang secara budaya belum menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang penting, atau tinggal di daerah bencana atau konflik. Oleh karena itu, untuk mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi masyarakat miskin diperlukan upaya khusus melalui penerapan pelaksanaan pendidikan non formal kesetaraan paket A, B dan C yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap. Pendidikan kesetaraan ditujukan bagi warga belajar yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup. Angka putus sekolah di DIY pada tahun 2013/2014 paling banyak terjadi pada jenjang SMA/MA ada di urutan kedua disusul tingkat SMP/MTs dan yang terakhir tingkat SD.



Sumber: BPS DIY, 2014

Gambar 1. Angka Putus Sekolah di DIY

Banyaknya masyarakat yang putus sekolah disebabkan karena faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Untuk mengurangi angka putus sekolah, pemerintah menyelenggarakan pendidikan non formal yang dapat menampung masyarakat putus sekolah untuk menyelesaikan pendidikannya. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan non formal sangat beragam, ada beberapa diantaranya yang dikelola oleh pemerintah dan ada juga yang dikelola oleh swasta. Lembaga yang dikelola oleh pemerintah biasanya menerima subsidi dalam penyelenggaraannya, sedangkan lembaga yang dikelola swasta lebih mandiri atau mereka mengelola lembaga tersebut tanpa subsidi dari pemerintah. Selain itu, kecenderungannya, lembaga yang dikelola pemerintah biasanya menggunakan pendekatan sosial, atau biaya yang dibebankan warga belajarnya tidaklah semahal lembaga yang dikelola

oleh swasta, karena tujuan yang yang dikelola oleh pemerintah adalah sosial bukan profit. Penyelenggara pendidikan non formal, seperti yang tertera pada pasal 5 Peraturan Pemerintah no 73 tahun 1991 dapat terdiri dari pemerintah, badan, kelompok atau perorangan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakannya. Salah satu yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berada di setiap daerah.

Peran pendidikan non formal dalam sistem pendidikan nasional sejalan dengan peran pendidikan formal, sehingga pelaksanaan program kesetaraan harus mengalami perluasan jangkauan sasaran dan peningkatan mutu. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang memiliki kualitas dan memenuhi kebutuhan ataupun kondisi warga belajar. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh penyelenggaraan adalah dengan cara menyelenggarakan program yang lebih luwes agar warga belajar dapat mengikuti program pendidikan kesetaraan hingga selesai tanpa mengalami hambatan. Oleh karena itu, penyelenggaraannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi warga belajar, namun tidak mengabaikan standar minimal layanan program yang telah ditetapkan.

Selain itu sekarang muncul adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang dikelola oleh masyarakat. Hal itu didasari oleh PP No 39 Tahun 1992 pada pasal 4 ayat 1 tentang peran serta

masyarakat dalam pendidikan nasional sebagai penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah. Lokasi PKBM yang berada di tiap-tiap kecamatan, memudahkan warga belajar dari tiap-tiap kecamatan untuk memperoleh pendidikan.

Menurut Sihombing (1999), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Dikatakan sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat, karena di dalamnya menyediakan berbagai macam jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti: Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Kursus-kursus, KBU, dan jenis pendidikan lainnya. Pada umumnya pengelola dan penyelenggara PKBM adalah masyarakat, tetapi juga difasilitasi oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional, melalui Subdin Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di tingkat propinsi atau kabupaten/kota). Usia warga belajar pada PKBM tergolong ke dalam kategori orang yang telah dewasa. Pendidikan orang dewasa berdasarkan rumusan Suprijanto (2007) merupakan serangkaian aktivitas pendidikan bagi orang dewasa yang menggunakan sebagian waktunya dan tanpa dipaksa ingin meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan mengubah sikapnya dalam rangka pengembangan dirinya sebagai individu dan meningkatkan partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya.

Sebagai institusi yang didirikan oleh, dari dan untuk masyarakat, PKBM memiliki potensi sebagai institusi yang mandiri. Meskipun awal berdirinya banyak PKBM yang bergantung pada bantuan dan dana dari pemerintah, sehingga bantuan pemerintah sangat berperan penting dalam kemajuan suatu PKBM. Namun dalam jangka panjang diharapkan pada sebagian besar PKBM akan tumbuh kemandirian, dalam hal ini peran dominan pemerintah yang selama ini menjadi semakin berkurang dan lebih pada peran fasilitasi akan dapat berjalan seiring dengan kemandirian dan PKBM akan berdiri kokoh atas keswadayaan masyarakat.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu lembaga non formal yang berfungsi sebagai tempat untuk membelajarkan masyarakat. Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tamanan yang berdiri pada tahun 2009 dan berlokasi Jl. Imogiri Timur Km 6,5 Nglebeng Baru, Tamanan, Banguntapan, Bantul adalah PKBM yang memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat yang tengah berlangsung di daerah diantaranya Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B,C), dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Dalam kegiatan pembelajaran di PKBM selalu ada masalah, berdasarkan observasi di PKBM Tamanan permasalahan yang umum adalah mengenai warga belajar yang kurang motivasi untuk selalu

aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, hal tersebut dikarenakan warga belajar yang sibuk bekerja. Selain itu permasalahan lain di PKBM Tamanan adalah metode pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga warga belajar kurang tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan dari segi sarana pembelajaran di PKBM Tamanan sudah memadai tetapi masih ada beberapa kekurangan seperti media untuk kegiatan pembelajaran.

Kegiatan penyelenggaraan PKBM diharapkan mampu motivasi belajar dan memberi penguatan dalam kemampuan keberaksaraan (mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung), wahana pemberian bekal awal pada peserta didik agar tumbuh dan berkembang kesiapan mental dan usahanya untuk mandiri, menguasai teknik ketrampilan tertentu dalam rangka mengatasi permasalahan hidup, dan peningkatan penghasilan masyarakat. Dalam mencapai suatu tujuan di PKBM terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, seperti kurangnya motivasi belajar peserta didik karena faktor usia dan pekerjaan, terbatasnya sarana prasarana dan metode mengajar yang kurang bervariasi dalam kegiatan pembelajaran yang menyebabkan pembelajaran kurang optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul Implementasi Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Di PKBM Tamanan. (Studi Kajian di PKBM Tamanan Banguntapan Bantul).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat yang tidak bisa bersekolah di pendidikan formal karena faktor umur, putus sekolah dan berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu.
2. Semangat belajar yang masih rendah karena banyaknya masyarakat yang lebih memilih bekerja di usia sekolah.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran kesetaraan, sehingga pembelajaran masih kurang optimal.
4. Media yang digunakan pendidik masih minim dan terbatas sehingga kurang memberikan motivasi belajar peserta didik.
5. Kesadaran kehadiran atau keaktifan warga belajar pada saat pembelajaran kurang.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah yang diperoleh, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan masyarakat yang tidak bisa bersekolah di pendidikan formal karena faktor usia, putus sekolah, dan keluarga tidak mampu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persiapan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di PKBM Tamanan?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di PKBM Tamanan?
3. Bagaimana evaluasi pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di PKBM Tamanan?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di PKBM Tamanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui persiapan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di PKBM Tamanan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di PKBM Tamanan.
3. Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di PKBM Tamanan.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di PKBM Tamanan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pengembangan keilmuan pendidikan bagi para peneliti dan semua pihak yang tertarik dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.
- b. Memperkaya kajian tentang; (1) pembinaan program pendidikan luar sekolah, (2) dampak pasca program, (3) pengembangan program pada umumnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi pendorong bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran kesetaraan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

b. Bagi Lembaga

Digunakan sebagai rekomendasi dalam meningkatkan pelaksanaan program PKBM.

c. Bagi Ketua PKBM dan Pendidik

Digunakan sebagai acuan agar lebih meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran yang dapat diterapkan pada PKBM.

d. Bagi Warga belajar

Diharapkan warga belajar mendapatkan pembelajaran yang berkualitas, karena pengelolaan pembelajaran yang memenuhi standar kurikulum 2006.